

Bab I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam dunia bisnis, Teknologi Informasi (TI) adalah salah satu peranan dalam menciptakan persaingan keuntungan bagi perusahaan. Teknologi Informasi tidak lagi dipandang hanya sebagai pelengkap, tetapi sudah menjadi salah satu penentu atas terlaksananya tujuan dan strategi bisnis perusahaan. Hal ini sudah menjadi satu hal penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional bisnis yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Semakin pesatnya perkembangan TI dewasa ini, membuat banyak organisasi dan perusahaan berusaha mengadopsi TI terbaru untuk membantu kelancaran bisnis. Dukungan TI terhadap dunia bisnis lazimnya diwujudkan dalam sekumpulan sistem yang terdiri atas sistem informasi dan infrastruktur pendukungnya (Wina & Falahah, 2007). Untuk itu, perkembangan teknologi informasi menjadi sangat pesat sehingga banyak digunakan oleh berbagai organisasi, perusahaan, kesehatan, dunia bisnis dan pendidikan yang dapat membantu dalam melakukan aktivitas dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Teknologi informasi menjadi sangat penting dan berpengaruh terhadap perkembangan suatu industri dalam bisnis. Dalam bisnis mensyaratkan bahwa layanan TI harus tersedia saat dibutuhkan serta memenuhi atau melampaui kebutuhan bisnis. Apabila TI gagal memenuhi ketersediaan layanan pada saat yang dibutuhkan, maka artinya TI gagal memberikan nilai tambah terhadap bisnisnya (Lukman & Aris, 2010). Upaya penerapan TI dibuat untuk memudahkan para penggunanya dalam menangani suatu permasalahan dan menjadikan penggunanya semakin efektif dalam memanfaatkannya. TI juga mampu memberikan keuntungan kepada organisasi sehingga mendorong terjadinya peningkatan ekspektasi terhadap peran TI. Adanya fungsi TI dalam bisnis semakin dituntut untuk mampu memberikan layanan yang berkualitas dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi. Dengan demikian perlu suatu tata kelola untuk memastikan berjalannya kegiatan proses bisnis sehingga dapat sesuai dengan rencana strategis TI.

Menurut (Van & Haes, 2005), menyatakan bahwa tata kelola didefinisikan sebagai kapasitas organisasi yang dilakukan oleh Dewan, manajemen eksekutif, dan manajemen TI guna untuk mengontrol penyusunan dan implementasi strategi TI, serta memastikan perpaduan bisnis dan TI. Namun faktanya di lapangan *top management* memberikan perhatian yang besar pada strategi bisnis namun peranan TI terabaikan yang kenyataannya, TI membutuhkan investasi yang sangat besar dan beresiko tinggi. Tata kelola yang terabaikan akan menjadi awal dari suatu bencana (ITGI, 2003). Penerapan tata kelola TI akan membantu perusahaan untuk tetap fokus terhadap nilai strategis IT dan memastikan penerapan TI tetap mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dibangunnya *IT governance* dapat membantu organisasi dalam pembentukan kerangka kerja yang mengarahkan dan memutuskan pemanfaatan TI sesuai kebutuhan yang selaras dengan visi misi, nilai-nilai, strategi dan budaya organisasi (Zafarina, Arief, & Mulyana, 2016). Untuk mewujudkan *IT Governance* dalam suatu organisasi, maka suatu organisasi harus menggunakan suatu kerangka kerja terstruktur yang dinamakan dengan *IT Governance Framework*.

Saat ini, banyak industri sudah menguasai berbagai sektor untuk memenuhi kebutuhan manusia, diantaranya berupa industri skala besar, skala menengah, maupun skala kecil atau yang sering disebut dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut Data Kementerian Negara Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa jumlah usaha mikro terus bertambah, dimana pada tahun 2012 jumlah usaha mikro mencapai 55.856.176 (98,79%), usaha kecil 629.418 (1,11%), usaha menengah 48.997 (0,09%) dan usaha besar 4.968 (0,01%). Proporsi tersebut sangat mencukupi jika dibandingkan dengan unit usaha korporasi. Sementara yang baru terlayani oleh pemerintah dan perbankan lebih kurang sekitar 12%. Ini menjelaskan bahwa peluang yang sangat besar bagi LKM untuk menyediakan akses pendanaan bagi sektor UKM tersebut (Konsultan, 2012). Namun, UMKM memiliki kelemahan untuk mengakses bagian perbankan, karena UMKM membutuhkan biaya yang cukup besar untuk investasi. Maka dari itu, perlu adanya peran LKM untuk membantu UMKM dalam memberikan bantuan dana dan pembinaan manajemen.

LKM (Lembaga Keuangan Mikro) merupakan lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro. Perkembangan LKM di Indonesia pada tahun 2012 berjumlah sekitar 77.422 LKM yang terdiri dari Bank, Koperasi, B3K (Bukan Bank Bukan Koperasi) yang berada di wilayah Indonesia.

Wilayah	LKM	Jumlah
Sumatera	Bank	1.273
	Koperasi	7.313
	B3K	8.761
Jawa	Bank	4.815
	Koperasi	21.341
	B3K	15.585
Bali dan Nusa Tenggara	Bank	813
	Koperasi	2.721
	B3K	3.049
Sulawesi	Bank	427
	Koperasi	3.414
	B3K	2.706
Kalimantan	Bank	553
	Koperasi	2.111
	B3K	1.210
Papua dan Maluku	Bank	358
	Koperasi	920
	B3K	52
Total	Bank	8.239
	Koperasi	37.820
	B3K	31.363
Total Jumlah		77.422

Gambar I.1 Perkembangan LKM pada Tahun 2012 (Tim Bina Swadaya Konsultan, 2012)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, jumlah LKM pada perbankan sebesar 10.7%, koperasi sebesar 48.8%, dan untuk B3K sebesar 40.5%. Dilihat dari lokasi layanannya, pulau Jawa memiliki jumlah LKM terbesar yaitu sebanyak 41.741 LKM atau sebesar 53.9%. Akan tetapi kemampuan LKM masih tergolong sulit dalam memberikan bantuan pada UMKM karena beberapa faktor, salah satunya adalah kondisi sumber daya manusia yang kurang memadai dan aset TI yang belum mendukung kegiatan keuangan yang dilakukan oleh LKM. Untuk itu dibutuhkan suatu tata kelola yang bertujuan agar LKM yang sudah ada dapat memberikan pelayanan yang optimal pada para pelaku UMKM di Indonesia khususnya dalam pelayanan TI. Dengan adanya tata kelola TI, LKM diharapkan memiliki pandangan yang baru terhadap pemisahan antara *governance* dan

management IT. Sehingga pada pelaku LKM dapat meningkatkan *value* bagi kelangsungan UMKM yang merupakan salah satu pendorong ekonomi di Indonesia.

Tabel 2. Jumlah LKM Berdasarkan Provinsi Table 2. Number of MFIs Based on Province						
Provinsi	Sep-15	Okt-15	Nov-15	Des-15	Jan-16	Province
Jawa Tengah	8	10	15	18	19	Central Java
Jawa Barat					10	West Java
Jawa Timur				2	2	East Java
Banten					1	Banten
Total	8	10	15	20	32	Total

Gambar I.2 Jumlah LKM Berdasarkan Provinsi (Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Menurut statistik LKM oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menjelaskan bahwa perkembangan LKM pada Provinsi Jawa khususnya Jawa Barat memiliki jumlah sebanyak 10 LKM pada tahun 2016 yang berada di bawah pengawasan OJK salah satunya yaitu PT Sarana Jabar Ventura. PT Sarana Jabar Ventura adalah perusahaan modal ventura daerah pertama di Indonesia, yang didirikan dengan tujuan untuk membina pengusaha kecil melalui pembiayaan dan bimbingan manajemen. Kerjasama antara PT Sarana Jabar Ventura dengan Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling memperkuat, saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Mengingat bahwa posisi PT Sarana Jabar Ventura berada di bawah pengawasan OJK, maka terdapat suatu kebijakan mengenai Tata Kelola sebagai pedoman untuk menerapkan tata kelola yang baik agar selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Akan tetapi, pada PT Sarana Jabar Ventura belum memiliki suatu kebijakan tata kelola mengenai TI. Sehingga perlu adanya suatu panduan agar terciptanya optimalisasi aset TI. COBIT sebagai salah satu *framework* yang menyediakan kerangka kerja komprehensif yang membantu pemerintahan dalam mencapai tujuan mereka untuk tata kelola TI dan manajemen pemerintahan. Hal ini dikarenakan apabila belum ada keselarasan antara teknologi yang digunakan dengan kebutuhan bisnis akan menyebabkan penurunan pada jumlah pendapatan perusahaan akibat kurangnya kepuasan pelanggan terhadap layanan (Prisyanti, Prasetyo, & Mulyana, 2016). Adapun manfaat dalam penerapan COBIT 5 yaitu; mengelola informasi dengan kualitas yang tinggi untuk mendukung keputusan bisnis, mencapai tujuan

strategi dan manfaat bisnis melalui pemakaian TI secara efektif dan inovatif, mengoptimalkan biaya dari segi layanan dan teknologi TI, serta mendukung kepatuhan pada hukum, peraturan, perjanjian, kontrak, dan kebijakan. COBIT 5 didasarkan pada lima domain, yaitu: APO (*Align, Plan, Organise*), BAI (*Build, Acquire and Implement*), DSS (*Deliver, Service, and Support*), EDM (*Evaluate, Direct, and Monitor*), dan MEA (*Monitor, Evaluate, and Assess*) (ISACA, COBIT 5 Framework, 2012).

Penelitian ini berfokus pada perancangan tata kelola domain proses BAI (*Build, Acquire, and Implement*). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tata kelola TI yang sesuai dengan *seven enabler* COBIT 5 dan *level* cakupan bisnis mereka. Domain BAI merupakan panduan bagi perusahaan untuk dapat merancang dan membangun solusi TI yang selaras dengan tujuan bisnis perusahaan.

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi tata kelola TI saat ini pada PT Sarana Jabar Ventura ?
2. Bagaimana perancangan tata kelola TI pada PT Sarana Jabar Ventura menggunakan COBIT 5 domain *Build, Acquire, Implement*?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami kondisi saat ini tata kelola TI pada PT Sarana Jabar Ventura.
2. Mengetahui dan memahami perancangan tata kelola TI pada PT Sarana Jabar Ventura menggunakan COBIT 5 pada domain *Build, Acquire, and Implement*.
3. Penelitian ini akan menghasilkan suatu rekomendasi tata kelola TI pada PT Sarana Jabar Ventura menggunakan COBIT 5.

I.4 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah yaitu:

1. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode wawancara dan kuisioner terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat.
2. Penelitian ini tidak membahas domain *Evaluate, Direct and Monitor* (EDM), *Align, Plan and Organize* (APO), *Deliver, Service and Support* (DSS), dan *Monitor, Evaluate, Asses* (MEA) pada COBIT 5.
3. Proses perancangan diperoleh berdasarkan melakukan kontrol prioritas dan profil risiko dari hasil *assessment*.
4. Penelitian ini tidak melakukan pengembangan aplikasi terkait kebutuhan perusahaan.

I.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu:

1. Memberikan penilaian dan masukan kebutuhan bisnis dengan menggunakan standar COBIT 5 terhadap kebutuhan kontrol.
2. Memberikan rekomendasi dalam menerapkan tata kelola TI yang baik bagi organisasi agar selaras dengan strategi bisnis dan tujuan.
3. Memberikan perancangan dalam meningkatkan kematangan TI yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas TI perusahaan.
4. Memberikan wawasan pengetahuan terkait praktik tata kelola TI bagi seluruh *stakeholder* PT Sarana Jabar Ventura.

I.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi pemilihan teori dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam mengolah dan menganalisa data.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang model konseptual serta sistematika penelitian yang akan digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab IV Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data

Pada bab ini menggambarkan tentang analisis dan pengolahan dalam penilaian data dengan menggunakan COBIT 5 sebagai panduan yang berfokus pada domain *Build, Acquire, and Implement* (BAI).

Bab V. Perancangan Seven Enabler

Pada bab ini dilakukan proses perancangan rekomendasi seven enabler terhadap kesenjangan yang telah di analisa sebelumnya.

Bab VI. Penutup

Pada bab ini akan memberikan kesimpulan dan saran terkait seluruh kegiatan penelitian ini yang berguna untuk meningkatkan *value* antara bisnis dan TI.